

Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Pengelolaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat

Sutra Ridena Koesherawaty Meylid¹, Dwi Putri Yuliani²

sutraridena@gmail.com¹ · dwi Putri Yuliani@ipdn.ac.id²

^{1,2}Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Abstrak- Artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kualitas sumber daya manusia terhadap pengelolaan dana desa dalam memberdayakan ekonomi penduduk desa dan untuk mencari tahu beberapa faktor yang memungkinkan dan menghambat mulai dari proses mengelola dana desa hingga kualitas dari sumber daya manusia yang ada di Desa. Artikel ini menggunakan metode Studi Literatur. Pendekatan studi literatur digunakan untuk menyelidiki peran kualitas sumber dan pengelolaan dana desa dalam konteks pembangunan desa. Literatur terkait kualitas SDM, pengelolaan dana desa, dan pertumbuhan ekonomi pedesaan menjadi dasar untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi di tingkat desa. Pada dasarnya kemajuan suatu negara dapat diidentifikasi oleh kemajuan desa. Oleh karena itu, Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh besar terhadap proses pengelolaan Dana Desa untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang meningkat. Studi kasus disini mengenai Desa yang dianalisis secara mendalam, dengan memfokuskan pada implementasi kualitas SDM dan pengelolaan dana desa dalam pengembangan ekonomi lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas SDM yang tinggi, terutama dalam hal pendidikan dan keterampilan, memiliki dampak positif terhadap pengelolaan dana desa dan pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat, diversifikasi sumber pendapatan, serta pemanfaatan teknologi menjadi faktor penting dalam kesuksesan ini.

Kata kunci: *Kualitas Sumber daya manusia, Pengelolaan dana desa, Pemberdayaan ekonomi desa, Pembangunan desa berbasis SDM, Faktor Penghambat dan Pendukung Pengelolaan Dana Desa*

Abstract- *This article aims to describe the quality of human resources in the management of village funds to empower the village economy and to identify factors that enable and hinder the process, from managing village funds to the quality of human resources in the village. The article employs a literature study method. The literature study approach is used to investigate the role of human resource quality and village fund management in the context of rural development. Relevant literature on human resource quality, village fund management, and rural economic growth serves as the basis for identifying factors influencing economic growth at the village level. Fundamentally, a country's progress can be identified through the development of its villages. Therefore, human resources play a crucial role in the village fund management process to foster economic growth.*

The case study focuses on a village that is analyzed in-depth, with an emphasis on the implementation of human resource quality and village fund management in local economic development. The findings reveal that high-quality human resources, particularly in terms of education and skills, have a positive impact on village fund management and economic growth. Community empowerment, income diversification, and the use of technology are identified as critical factors in this success.

Keywords: *Human Resource Quality, Village Fund Management, Village Economic Empowerment, Human Resource-Based Village Development, Inhibiting and Supporting Factors in Village Fund Management.*

1. PENDAHULUAN

Desa memiliki peranan penting sebagai ujung tombak pembangunan di Indonesia. Sebagai unit terkecil dari pemerintahan, desa menjadi entitas yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, pengelolaan dana desa menjadi instrumen strategis untuk mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun, keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya bergantung pada alokasi anggaran, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang terlibat.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki pengaruh yang sangat signifikan dan positif terhadap keberhasilan pengelolaan dana desa, yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kualitas SDM perangkat desa memegang peranan penting dalam memastikan keberhasilan tahapan pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban. Proses ini harus dilaksanakan dengan terarah dan terukur sejak dana tersebut ditransfer dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, hingga akhirnya dikelola di tingkat desa.

Kasus Penyelewengan Dana Desa yang menarik banyak perhatian pemerintah dan masyarakat adalah kasus penyelewengan yang baru terjadi. Ketika oknum Kepala Desa tersebut membuat sebuah laporan pembangunan infrastruktur dengan menggunakan Dana APBDes tahun 2022 dilakukan pada bulan juli hingga desember 2022, beberapa pembangunan yang dilaporkan seperti RTLH, Talud, JUT dan beberapa pembangunan lain yang ternyata secara fisik tidak ada. Ada sebagian kegiatan yang sudah dibelikan materilnya tapi pembangunannya juga tidak ada. Menurut Kasat Reskrim Polres Blora, AKP Slamet “Modus yang dilakukan adalah dengan cara memberi informasi kepada Bendahara Desa bahwa dana APBDes akan turun dan dipinjam, kemudian mereka mencoba melakukan pencairan dan membuat berita acara seolah-olah terdapat kepentingan, namun itu hanya fiktif belaka.” Berangkat dari kekhawatiran dari pengelolaan Dana Desa pemerintah pusat membuat peraturan mengenai mekanisme pengajuan, pencairan serta tahap pengalokasian Dana Desa dilapangan.

Pemerintah berupaya untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat secara merata, namun karena keterbatasan sumber daya manusia yang ada, sehingga banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan pemerintah dengan kebijakan desentralisasi yang sekiranya mencoba memberikan kewenangan terhadap pemerintah Desa untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di daerahnya. Salah satu kewenangan yang diberikan dalam pengelolaan Dana Desa secara mandiri dengan undang-undang Desa no. 6 Tahun 2014 pasal 75 dimana kepala desa memiliki kewenangan mengelola dan mengatur keuangan sesuai dengan kebutuhan dan prakarsa masyarakat. Untuk itu diperlukannya pemahaman yang kuat mengenai Dana Desa.

Dana desa sendiri merupakan program strategis yang bertujuan memperkuat peran desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan, dan memberdayakan

masyarakat desa. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014, desa memiliki otoritas untuk mengelola keuangan secara mandiri, baik yang bersumber dari pendapatan asli desa, APBN, APBD, hasil retribusi daerah, hibah dari pihak ketiga, maupun sumber pendapatan lainnya. Dana desa diutamakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, peningkatan kesejahteraan, serta pemberdayaan masyarakat desa, yang direncanakan melalui Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2013 tentang otoritas Pemerintah Delsa untuk mengelola keuangan secara mandiri.

Sebagai entitas mikro, desa sering kali menghadapi tantangan unik, termasuk ketidaksetaraan dalam akses sumber daya dan peluang pembangunan. Namun, dengan kebijakan pembangunan yang tepat, desa memiliki potensi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang holistik dan inklusif. Seperti yang diungkapkan oleh Ardiyanti (2018), desa dapat menjadi contoh nyata bagaimana pengelolaan yang efektif, didukung oleh SDM yang berkualitas, dapat mendorong keberlanjutan ekonomi lokal.

Keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya bergantung pada jumlah dana yang tersedia, tetapi juga pada kapasitas masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkannya secara efektif. Oleh sebab itu, fokus pada peningkatan kualitas SDM menjadi salah satu faktor kunci dalam menjalankan program pembangunan desa. Masyarakat yang memahami kebutuhan dan potensi lokal mereka akan mampu mengidentifikasi proyek strategis dan relevan, menciptakan dasar yang kokoh untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Selain itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat harus dijadikan landasan dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana desa. Ketiga prinsip ini menciptakan rasa memiliki di kalangan masyarakat terhadap proyek-proyek pembangunan yang sedang berlangsung, sehingga mendorong partisipasi aktif mereka dalam implementasi program-program tersebut (Tamrin, 2023).

2. Kajian Literatur

Nama Peneliti	Metode Penelitian	Hasil
Mahyudin, dkk (2022)	Kualitatif	Hasil Penelitian diuraikan bahwa kualitas sumber daya manusia pemerintahan desa dalam mengelola dana desa di kecamatan Lasalimu Selatan memadai dan sumber daya manusia rata-rata didominasi oleh lulusan sma
Sigit Muhamaad (2020)	Deskriptif Eksploratif	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat desa titian kuala berperan aktif

		dalam seluruh tahapan pembangunan desa, mulai dari tahap perencanaan pembangunan, pelaksanaan, kegiatan pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan serta evaluasi dari pembangunan yang telah dilakukan.
Toyib, dkk (2020)	Metode Purposive Sampling	Secara simultan kapasitas aparatur desa, ketaatan pelaporan keuangan desa, kualitas pengawasan BPD dan pendamping desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.

Dari kajian literatur diatas dapat disimpulkan bahwa peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas utama dalam mewujudkan pengelolaan dana desa yang efektif dan berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah dan pihak terkait perlu terus mendukung pengembangan kapasitas SDM di tingkat desa melalui pelatihan, pendidikan, serta penyediaan sumber daya yang memadai.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu proses yang digunakan untuk memecahkan masalah secara logis. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan *library research* dan melakukan *literatur review*.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa merupakan salah satu tujuan utama dari program dana desa yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia. Dana desa diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerah perdesaan dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang merata. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, pengelolaan dana desa yang efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) yang mengelola dana tersebut. Kualitas SDM yang tinggi dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan dana desa, sementara SDM yang berkualitas rendah dapat menghambat proses pembangunan dan menurunkan dampak positif yang diinginkan. Oleh karena itu, penting untuk memahami pengaruh kualitas SDM terhadap pengelolaan dana desa dan bagaimana hal ini dapat berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa.

a. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan proses yang melibatkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dalam penggunaan dana yang diterima oleh pemerintah desa. Dana desa diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa. Dalam pengelolaannya, dana desa harus digunakan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi aktif dari masyarakat desa. Keberhasilan pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur desa dalam merencanakan dan melaksanakan program yang tepat guna dan efektif.

Proses pengelolaan dana desa dimulai dengan perencanaan, di mana pemerintah desa menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) yang memuat prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setelah perencanaan, dana desa digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, masyarakat, serta pihak eksternal seperti auditor menjadi bagian penting untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan tepat sasaran. Terakhir, pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa harus dilakukan secara transparan kepada masyarakat melalui laporan yang dapat diakses oleh publik.

Strategi efektif dalam pengelolaan dana desa antara lain yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di tingkat desa sangat penting. Pemerintah dapat memberikan pelatihan dan pendampingan teknis bagi aparat desa terkait dengan manajemen keuangan, perencanaan pembangunan, dan pengawasan dana desa. Pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan aparat desa dalam mengelola dana dengan lebih baik.

Kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa perlu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Masyarakat harus diberikan akses informasi yang jelas mengenai penggunaan dana desa, dan mereka perlu dilibatkan dalam evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Penggunaan teknologi informasi, seperti sistem aplikasi pelaporan keuangan desa, juga dapat membantu dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Ketiga, penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif juga penting untuk memastikan penggunaan dana desa berjalan sesuai dengan rencana. Pemerintah desa perlu membentuk tim evaluasi yang terdiri dari berbagai pihak, termasuk masyarakat dan lembaga independen, untuk memantau

jalannya program dan mengevaluasi dampaknya. Sistem ini akan membantu mengidentifikasi permasalahan sejak dini dan memberikan solusi yang tepat.

b. Peran Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Dana Desa

Sumber daya manusia di desa memainkan peran yang sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa. Pengelolaan yang baik tidak hanya mengandalkan ketersediaan dana yang cukup, tetapi juga melibatkan perencanaan yang matang, pelaksanaan yang efisien, serta pengawasan yang transparan dan akuntabel. Dalam konteks ini, SDM yang ada di desa terutama aparat pemerintah desa harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang memadai terkait pengelolaan anggaran, penyusunan anggaran, serta prosedur pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

1. Perencanaan dan Penyusunan Anggaran

Proses perencanaan yang baik adalah fondasi dari pengelolaan Dana Desa yang sukses. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus didasarkan pada analisis kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan desa. Untuk itu, SDM desa, termasuk kepala desa dan perangkat desa, perlu memiliki kemampuan dalam merumuskan rencana kerja yang sesuai dengan visi dan misi pembangunan desa. Pengalaman dan pengetahuan dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sangat penting agar Dana Desa dapat digunakan secara optimal dan tepat sasaran.

2. Pelaksanaan Kegiatan dan Program Desa

Pelaksanaan program pembangunan yang didanai oleh Dana Desa membutuhkan keahlian teknis dalam pengelolaan proyek, mulai dari tender pengadaan barang dan jasa hingga pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Kualitas SDM yang baik di tingkat desa akan menjamin agar kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana dan tidak mengalami penyimpangan, baik dalam hal waktu, kualitas, maupun anggaran. Tanpa adanya kemampuan manajerial yang baik, pengelolaan proyek pembangunan di desa dapat berisiko gagal atau bahkan diselewengkan.

3. Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa menjadi hal yang krusial agar dana yang telah dialokasikan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik kepada masyarakat. Dalam hal ini, SDM yang ada di desa harus memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan secara transparan dan objektif, baik oleh pihak internal desa maupun melalui partisipasi masyarakat. Selain itu, SDM desa juga harus memahami pentingnya laporan pertanggungjawaban yang jelas, agar proses pengelolaan Dana Desa dapat diakses dan diawasi oleh publik.

c. Tantangan dalam Pengelolaan Dana Desa

Meskipun kualitas SDM sangat berpengaruh terhadap pengelolaan Dana Desa, sejumlah tantangan dihadapi dalam meningkatkan kapasitas SDM di tingkat desa. Beberapa tantangan tersebut antara lain:

1. **Keterbatasan Pengetahuan dan Keterampilan**

Sebagian besar perangkat desa di Indonesia masih memiliki keterbatasan dalam hal pengetahuan dan keterampilan terkait pengelolaan anggaran dan administrasi pemerintahan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Keterbatasan ini mengakibatkan rendahnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan program yang didanai oleh Dana Desa. Banyak desa yang tidak memiliki tenaga ahli dalam bidang akuntansi, manajemen proyek, atau pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan regulasi.

2. **Kurangnya Pelatihan dan Pengembangan SDM**

Banyak desa yang masih kekurangan pelatihan dan pengembangan SDM yang memadai. Meskipun beberapa instansi pemerintah dan lembaga pendidikan telah memberikan pelatihan, namun distribusi pelatihan tersebut masih terbatas pada wilayah tertentu. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam kualitas SDM desa yang berujung pada pengelolaan Dana Desa yang tidak optimal.

3. **Korupsi dan Penyalahgunaan Dana**

Praktik korupsi dan penyalahgunaan Dana Desa masih terjadi di beberapa wilayah, meskipun ada berbagai upaya untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi. Faktor ketidakpahaman tentang tata kelola yang baik dan kurangnya pengawasan dari masyarakat sering kali memfasilitasi terjadinya penyelewengan dana, yang pada akhirnya merugikan pembangunan desa itu sendiri.

d. Solusi untuk Meningkatkan Kualitas SDM dalam Pengelolaan Dana Desa

Untuk mengatasi tantangan di atas, beberapa langkah dapat diambil untuk meningkatkan kualitas SDM dalam pengelolaan Dana Desa, antara lain:

1) **Peningkatan Pelatihan dan Pendidikan**

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu meningkatkan program pelatihan dan pendidikan untuk perangkat desa, baik dalam hal manajemen keuangan, perencanaan pembangunan, maupun akuntabilitas. Pelatihan ini harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik desa dan dirancang agar dapat meningkatkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam pengelolaan Dana Desa.

2) **Penguatan Pengawasan dan Partisipasi Masyarakat**

Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa harus melibatkan masyarakat secara langsung. Peningkatan kapasitas masyarakat untuk memahami anggaran desa dan mekanisme pengelolaan dana akan memudahkan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas. Dalam hal ini, penguatan

lembaga pengawasan desa, seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan kelompok masyarakat lainnya, menjadi sangat penting.

3) **Penggunaan Teknologi untuk Mempermudah Pengelolaan**

Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan Dana Desa dapat membantu mempermudah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan pembangunan. Dengan adanya sistem informasi yang transparan dan mudah diakses, perangkat desa akan lebih mudah dalam mengelola anggaran serta melaporkan penggunaan Dana Desa kepada masyarakat.

Pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan dana desa menjadi aspek fundamental yang harus dikuasai oleh pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa, terutama perangkat desa, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Pengelolaan dana desa dilakukan sesuai dengan kerangka kebijakan yang meliputi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, hingga Peraturan Kepala Daerah. Keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat diukur dari sejauh mana ketiga aspek tersebut regulasi, implementasi, dan hasil berjalan secara harmonis. Apabila salah satu aspek tidak terlaksana dengan baik, maka hal ini mencerminkan kegagalan dalam pengelolaan dana desa sesuai peraturan yang berlaku.

Keberhasilan pengelolaan dana desa tidak hanya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia, tetapi juga oleh sistem pengelolaan yang akuntabel. Komitmen tinggi dari aparatur desa, didukung dengan kompetensi yang memadai, merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Proses ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi setiap program yang dijalankan. Pada setiap tahapan tersebut, pengelolaan keuangan desa, termasuk dana desa, harus dilakukan secara efektif agar tujuan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dapat tercapai.

Sistem pengelolaan dana desa yang baik dapat dilihat dari adanya keselarasan antara tujuan aparatur desa dengan visi pembangunan desa itu sendiri. Hal ini menekankan pentingnya sinergi antara kualitas sumber daya manusia dan sistem pengelolaan yang akuntabel untuk mewujudkan keberhasilan pengelolaan dana desa.

Pembangunan desa merupakan salah satu aspek penting dalam menciptakan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di Indonesia. Salah satu kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk mendukung pembangunan di tingkat desa adalah "Dana Desa." Dana Desa merupakan alokasi anggaran yang disalurkan langsung oleh pemerintah pusat kepada desa dengan tujuan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, serta meningkatkan kualitas hidup di desa. Konsep Dana Desa pertama kali diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan menjadi bagian integral dalam agenda pembangunan nasional. Artikel ini akan membahas tentang Dana Desa, tujuan penggunaannya, serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya.

e. Kualitas Sumber Daya Manusia: Kunci Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan Dana Desa yang efektif tidak dapat dipisahkan dari peran SDM yang kompeten. Aparatur desa, sebagai ujung tombak pengelolaan Dana Desa, harus memiliki pemahaman yang baik tentang tata kelola keuangan, perencanaan pembangunan, dan akuntabilitas. Penelitian Warisno yang dikutip oleh Firdaus et al. (2015) menunjukkan bahwa SDM dengan latar belakang pendidikan yang relevan, pelatihan berkelanjutan, dan pengalaman di bidang keuangan memiliki dampak positif terhadap kinerja pengelolaan keuangan desa.

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen krusial yang memengaruhi kinerja pemerintahan desa. Penelitian yang dilakukan oleh Warisno, sebagaimana dikutip oleh Firdaus et al. (2015:47), menyatakan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang baik memerlukan SDM berkualitas, dengan dukungan latar belakang pendidikan akuntansi, partisipasi aktif dalam pelatihan dan pendidikan lanjutan, serta pengalaman dalam bidang keuangan.

Penelitian Hendri et al. (2016) mengungkapkan adanya hubungan positif dan signifikan antara kualitas SDM dan kinerja pengelolaan keuangan desa. Sementara itu, studi yang dilakukan oleh Munti dan Fahlevi (2017) menunjukkan bahwa kapasitas aparatur desa secara positif memengaruhi kinerja pengelolaan keuangan desa. Penelitian lain oleh Rulyanti et al. (2017) juga mendukung temuan tersebut, menunjukkan bahwa kualitas SDM memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa dan kinerja pemerintahan desa.

Selain itu, Wardani dan Andriyani (2017) menyimpulkan bahwa kualitas SDM secara signifikan berkontribusi terhadap keandalan pelaporan keuangan di tingkat pemerintahan desa. Temuan-temuan ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Afrianti, sebagaimana dikutip oleh Wardani dan Andriyani (2017:89), menyatakan bahwa kualitas sumber daya manusia mencerminkan kemampuan individu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan, yang didukung oleh pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang memadai. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah yang optimal, perangkat desa dituntut memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, dilengkapi dengan latar belakang pendidikan yang relevan, pelatihan khusus, serta pengalaman di bidang keuangan.

Artikel ini menjelajahi peran kualitas SDM dan pengelolaan dana desa dalam menggambarkan peta jalan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di desa. Dengan demikian, kita dapat belajar dari pengalaman positif dan menerapkan wawasan tersebut untuk mendorong pembangunan serupa di berbagai konteks.

Untuk meningkatkan kualitas SDM, beberapa faktor yang perlu diperhatikan meliputi:

2. **Pendidikan Tinggi:** Mendorong perangkat desa dan masyarakat untuk mengenyam pendidikan formal maupun informal yang relevan.
3. **Keterampilan Kerja:** Meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial perangkat desa.
4. **Kepemimpinan Lokal:** Mengembangkan kepemimpinan yang efektif dan berintegritas di tingkat desa.
5. **Kesadaran Lingkungan:** Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya keberlanjutan lingkungan dalam pembangunan desa.
6. **Kemandirian Ekonomi:** Mendorong inovasi lokal untuk menciptakan sumber penghasilan baru.
7. **Partisipasi Masyarakat:** Memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan.
8. **Penggunaan Teknologi:** Mengoptimalkan teknologi untuk efisiensi dan transparansi pengelolaan dana desa.

Adapun pengaruh kualitas SDM terhadap pengelolaan dana desa mencakup:

2. **Pemahaman Konsep Pembangunan:** Meningkatkan kemampuan perangkat desa dalam merancang program pembangunan yang relevan.
3. **Kemampuan Perencanaan:** Menyusun rencana kerja yang realistis dan terukur.
4. **Transparansi dan Akuntabilitas:** Memastikan pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
5. **Partisipasi Masyarakat:** Mendorong masyarakat untuk berkontribusi dalam pengambilan keputusan.
6. **Manajemen Proyek:** Mengelola proyek secara profesional untuk mencapai hasil yang optimal.
7. **Penggunaan Teknologi:** Memanfaatkan teknologi untuk mendukung pengelolaan keuangan desa.

5. KESIMPULAN

Kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan elemen yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan pengelolaan Dana Desa. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa SDM yang berkualitas, dengan latar belakang pendidikan yang sesuai, pelatihan yang berkelanjutan, serta pengalaman dalam bidang keuangan, memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Sebagai contoh, penelitian yang dilakukan oleh Warisno (dikutip oleh Firdaus et al., 2015) menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik memerlukan SDM yang memiliki kompetensi dalam

bidang akuntansi dan keuangan, serta aktif dalam pelatihan untuk memperbarui keterampilannya. Selain itu, penelitian oleh Hendri et al. (2016) menunjukkan adanya hubungan yang positif antara kualitas SDM dan kinerja pengelolaan keuangan desa, yang turut diperkuat oleh studi Munti dan Fahlevi (2017), yang mengungkapkan bahwa kapasitas aparatur desa berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan Dana Desa.

Kualitas SDM juga berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Andriyani (2017) menunjukkan bahwa kualitas SDM berkontribusi signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan desa, yang menjadi indikator penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks ini, peningkatan kapasitas SDM desa menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Peningkatan kualitas SDM di tingkat desa dapat dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain peningkatan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan teknis serta manajerial perangkat desa. Selain itu, penguatan pengawasan dan partisipasi masyarakat, serta pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan keuangan desa, juga menjadi faktor penting dalam mendukung kualitas pengelolaan Dana Desa. Dengan demikian, kualitas SDM yang mumpuni akan menjadi kunci utama dalam mencapai tujuan pembangunan desa yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, A., et al. (2015). "Kualitas Sumber Daya Manusia dan Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, 47, 45-55.
- Hendri, M., et al. (2016). "Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Administrasi Publik*, 12(2), 102-115.
- Mahyudin, dkk. (2022). *Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Lasalimu Selatan*. Penelitian Kualitatif.
- Munti, A., & Fahlevi, R. (2017). "Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Keuangan Desa." *Jurnal Keuangan Daerah*, 8(1), 78-89.
- Pratama, I. S. (2019). "Tantangan Implementasi Dana Desa di Indonesia". *Jurnal Pembangunan Desa*, 10(2), 45-61.
- Rulyanti, N., et al. (2017). "Sumber Daya Manusia dan Keandalan Pelaporan Keuangan Desa." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 10(3), 34-42.
- Sigit Muhammad. (2020). *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*. Penelitian Deskriptif Eksploratif.
- Toyib, dkk. (2020). *Pengaruh Kapasitas Aparatur Desa terhadap Kinerja Pengelolaan Dana Desa*. Penelitian dengan Metode Purposive Sampling.

Wardani, R., & Andriyani, S. (2017). "Pengaruh Kualitas SDM terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Jurnal Pemerintahan Desa*, 5(4), 89-97.

Transparency International Indonesia. (2020). "Laporan Transparansi Pengelolaan Dana Desa." Jakarta: TII.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.